

Indikator Tingkat Hidup Pekerja/karyawan D.I. Yogyakarta

Agustus 2016 - 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Indikator Tingkat Hidup Pekerja/karyawan D.I. Yogyakarta

Agustus 2016 - 2017



Indikator Tingkat Hidup Pekerja/karyawan D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - 2017

ISSN : 2460-3171
Nomor Publikasi : 34.520.16.09
Katalog BPS : 2302002
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : vii+56 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Diterbitkan oleh :
@ Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dicetak oleh :
CV Magna Raharja Tama (Mahata) Yogyakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Salah satu indikator kesejahteraan tenaga kerja di suatu wilayah adalah tingkat hidup pekerja/karyawan. Evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan tenaga kerja yang telah dilakukan serta menjadi landasan untuk menentukan kebijakan ketenagakerjaan di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan melihat gambaran tentang tingkat hidup pekerja/karyawan.

Publikasi ini menyajikan tentang berbagai indikator tingkat hidup pekerja/karyawan meliputi keadaan pekerja/karyawan, sektor/lapangan usaha dan pendidikan pekerja/karyawan, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan, upah minimum (UMP), dan pasar tenaga kerja.

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah data dasar hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016 - Agustus 2017 BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain itu terdapat data sekunder yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I. Yogyakarta serta Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).

Semoga publikasi ini dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan data bagi penyusunan kebijakan pengambilan keputusan. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini sehingga publikasi ini dapat diterbitkan tepat pada waktunya.

Yogyakarta, April 2018
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala



Johaness De Britto Priyono, M.Sc

ABSTRAKSI

Faktor penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara adalah Tenaga kerja, tetapi tenaga kerja juga dapat menjadi faktor penghambat apabila tenaga kerja yang ada mendatangkan berbagai macam masalah. Ketenagakerjaan di D.I Yogyakarta masih kurang optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi meskipun program penurunan angka pengangguran terus dicanangkan.

Tujuan penyusunan publikasi Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan D.I Yogyakarta Agustus 2016 - 2017 adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat hidup pekerja/karyawan di D.I Yogyakarta. Hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa sekitar 49,4 persen penduduk yang bekerja di D.I. Yogyakarta berstatus sebagai pekerja/karyawan, baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja bebas. Penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai pekerja/karyawan sebesar 56,7 persen dan perempuan sebesar 40,5 persen. Persentase pekerja/karyawan laki-laki meningkat 0,2 persen poin dan perempuan menurun 0,9 poin dalam periode Agustus 2016 - Agustus 2017.

Sektor S (*services*) sampai Agustus 2017 merupakan sektor yang paling dominan menyerap pekerja/karyawan yaitu sebesar 62,9 persen, menurun dibandingkan kondisi Agustus 2016 sebesar 66,5 persen. Dilihat menurut wilayahnya, pekerja/karyawan yang bekerja di sektor S pada Agustus 2017 adalah sebesar 67,7 persen di daerah perkotaan dan 46,1 persen di daerah pedesaan. Sebaliknya sektor A (*Agriculture*) hanya menyerap tenaga kerja sebesar 3,1 persen di daerah perkotaan dan 11,3 persen di daerah pedesaan.

Pada Agustus 2017, tingkat pendidikan pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta mengalami perubahan sedikit dibandingkan dengan Agustus 2016. Persentase tertinggi pendidikan pekerja adalah SLTA sebesar 43,2 persen atau meningkat 2,1 persen poin dibandingkan kondisi Agustus 2016 yang sebesar 41,1

persen. Persentase yang berpendidikan SLTP ke bawah dan di atas SLTA menurun masing-masing dari 35,3 persen menjadi 34,5 persen dan 23,6 persen menjadi 22,3 persen.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
I. PENDAHULUAN	3
II. SUMBER DATA.....	13
III. KONSEP DAN DEFINISI.....	17
IV. PEKERJA/KARYAWAN DAN PENDUDUK YANG BEKERJA.....	23
V. PEKERJA/KARYAWAN MENURUT SEKTOR/LAPANGAN USAHA.....	29
VI. PEKERJA/KARYAWAN MENURUT PENDIDIKAN	35
VII. RATA-RATA UPAH/GAJI PEKERJA/KARYAWAN	41
VIII. UPAH MINIMUM KAB/KOTA DAN UPAH MINIMUM PROVINSI.....	47
IX. PASAR TENAGA KERJA.....	51

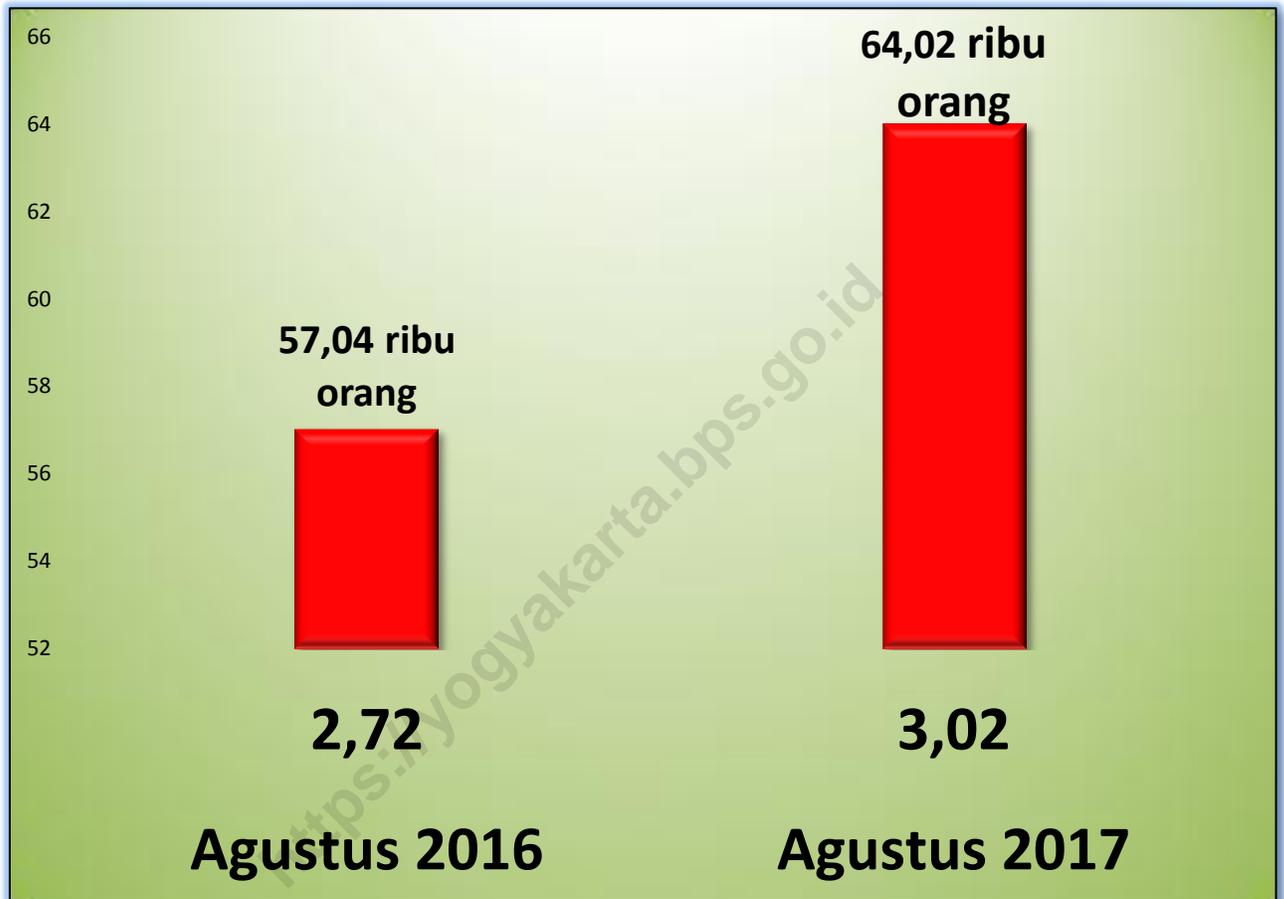
DAFTAR TABEL

Tabel A. Sejarah Sakernas 1976 – 2017	9
Tabel 4.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di D.I. Yogyakarta Agustus 2016 - Agustus 2017	24
Tabel 4.2. Persentase Pekerja Perempuan dengan Status Pekerja Keluarga/Tak Dibayar menurut Sektor di D.I. Yogyakarta Agustus 2016 - Agustus 2017	26
Tabel 5.1. Persentase Pekerja/Karyawan menurut Sektor di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - Agustus 2017	30
Tabel 6.1. Pekerja/Karyawan menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - Agustus 2017	36
Tabel 7.1. Rata-rata Upah/Gaji Sebulan menurut Sektor/Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - Agustus 2017	41
Tabel 8.1. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi di D.I. Yogyakarta, 2014 – 2018	48
Tabel 9.1. Pasar Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - Agustus 2017	51
Tabel 9.2 Tenaga Kerja Indonesia menurut Kabupaten/Kota dan Negara Tujuan Terbanyak yang Diproses di BP3TKI Yogyakarta 2017	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.	Jumlah Pengangguran dan TPT Agustus 2016 - 2017	1
Gambar B.	Persentase Pekerja Perempuan Dengan Status Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Menurut Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta Agustus 2017 ..	11
Gambar C.	Persentase Jumlah Pekerja Menurut Kabupaten/kota di D.I Yogyakarta, Agustus 2017	15
Gambar D.	Persentase Jumlah Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di D.I. Yogyakarta Agustus 2016 - 2017	21
Gambar E.	Persentase Pekerja/karyawan Menurut Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - 2017.....	27
Gambar 5.1.	Persentase Pekerja/Karyawan menurut Sektor dan Daerah Tempat Tinggal di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - Agustus 2017	31
Gambar F.	Pekerja/Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - 2017.....	33
Gambar G.	Rata-Rata Upah/Gaji Sebulan Menurut Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2017.....	39
Gambar 7.1.	Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2017.....	42
Gambar H.	Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/kota dan Upah Minimum Provinsi di D.I. Yogyakarta Tahun 2017 - 2018	45
Gambar I.	Pasar Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2017 ..	49
Gambar 9.1.	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar di Disnakertrans D.I. Yogyakarta Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2017.....	52

Grafik A. Jumlah Pengangguran dan TPT Agustus 2016 - 2017



I. PENDAHULUAN

Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami. Besar karena menyangkut jutaan jiwa. Untuk menggambarkan masalah tenaga kerja di masa yang akan datang tidaklah gampang karena selain mendasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, harus juga diketahui prospek produksi di masa mendatang. Kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja di samping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha.

Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang penting adalah modal asing, proteksi iklim investasi, pasar global, dan perilaku birokrasi serta "tekanan" kenaikan upah (Majalah Nakertrans, 2004). Otonomi daerah yang dalam banyak hal juga tidak berpengaruh positif terhadap tenaga kerja. Masalah kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan. Rucker (1985:2) sebagaimana dilansir oleh majalah Nakertrans, menduga bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia bersifat multidimensi sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula. Tidak ada jalan pintas dan sederhana untuk mengatasinya. Strategi pemulihan dan rekonstruksi ekonomi yang bertumpu pada penciptaan lapangan kerja merupakan keharusan. Dalam kaitan ini, masih sangat relevan untuk diperhatikan secara serius dua elemen strategi yang pernah diajukan oleh Misi ILO (1999:5) yaitu (i) strategi dan kebijakan yang membuat proses pertumbuhan ekonomi menjadi lebih memperhatikan aspek ketenagakerjaan, dan (ii) tindakan yang dibutuhkan untuk mendapatkan lapangan kerja tambahan melalui program-program penciptaan lapangan kerja secara langsung.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output* riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan *output* perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

Pertambahan penduduk berarti penambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang berkurang mengakibatkan kenaikan output semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Sebaliknya kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang berkurang. Penyebab rendahnya pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang akibat pertumbuhan penduduk sangat cepat, sementara tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa penambahan kuantitas dan kualitas sumber daya alam, kapital, dan kemajuan teknologi.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Meskipun demikian, kita masih mempertanyakan apakah begitu cepatnya pertumbuhan penawaran angkatan kerja di negara-negara berkembang benar-benar akan memberikan dampak positif, atau justru negatif, terhadap pembangunan ekonomi. Sebenarnya, positif atau negatifnya pertumbuhan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Adapun kemampuan itu sendiri lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat jenis

akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara, tetapi tenaga kerja juga dapat menjadi faktor penghambat apabila tenaga kerja yang ada mendatangkan berbagai macam masalah. Ketenagakerjaan di Indonesia masih kurang optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi meskipun program penurunan angka pengangguran terus dicanangkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa tingkat pengangguran di wilayah DI Yogyakarta per Agustus 2017 adalah sebesar 3,02 persen (sebanyak 64,02 ribu orang), meningkat dibanding Agustus 2016 sebesar 2,72 persen (sebanyak 57,04 ribu orang). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengangguran sekitar 7 ribuan orang sepanjang periode tersebut. Tantangan besar pemerintah pusat dan daerah adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak (*decent work*) bagi tenaga kerja yang jumlahnya banyak dan cenderung terus meningkat. Tantangan itu mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktifitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (*decent living*).

Tantangan itu jelas terlalu berat untuk dihadapi hanya oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Meskipun demikian, peran yang dimainkan pemerintah dapat sangat menentukan jika dilakukan melalui pembangunan yang secara benar dan konsisten yang dirancang berbasis ketenagakerjaan, serta dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerjaan informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah

industrial yang dapat memenuhi semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan.

Kualitas tenaga kerja DI Yogyakarta yang rendah juga menjadi kendala, hal ini di latarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja, seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, tingkat kehadiran, inisiatif dan kreativitas, kesehatan serta perilaku/sikap. Sedangkan untuk faktor eksternal, meliputi: kedisiplinan kerja, tingkat kerja sama, perasaan aman dan nyaman dalam bekerja, teknologi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dan bidang pekerjaan sesuai dengan bidang yang diminati. Motivasi bekerja yang kurang atau yang menunjukkan sifat kemalasan tenaga kerja akan membuat pekerjaannya tidak membuahkan hasil yang baik dan maksimal. Keterampilan tenaga kerja pun sangat mempengaruhi kualitas kerjanya. Sehingga kualitas tenaga kerja Indonesia dan hasil produksinya kurang maksimal. Pekerja dengan produktivitas yang tinggi, agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi harus dilakukan dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Untuk itu pekerja harus dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

Visi Indonesia yang maju dan mandiri tercermin dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada pencapaian sasaran secara umum, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang diperlihatkan oleh angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1 atau ekuivalen dengan angka fertilitas total (TFR) 2,1 per satu orang perempuan usia reproduktif. Intinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan adalah berupa peningkatan daya saingnya. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan menyelenggarakan pembangunan pendidikan

sehingga memiliki daya saing dalam era global. Itu dilakukan dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia secara luas dan tanpa diskriminasi.

Modal sumber daya manusia merupakan sumber penggerak pertumbuhan dan daya saing yang sangat diperlukan dalam pasar global, karenanya harus ada jaminan bahwa anak-anak atau generasi penerus akan mendapatkan pendidikan dasar dan menengah agar mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar yang memadai ketika mereka masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, akses terhadap pendidikan harus ditingkatkan, meningkatkan kebijakan sosial seperti beasiswa, subsidi sekolah, dan bantuan tunai bersyarat untuk memastikan anak-anak lulus SD dan SMP. Juga perlu diselenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Karena itu, perlu disediakan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang memadai. Penyediaan pelayanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi dan pemberian perhatian yang lebih besar pada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan pendidikan.

Penciptaan lapangan kerja dengan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, di antaranya mencakup kualitas pendidikan, kesinambungan sosial, dan lingkungan usaha yang kondusif dan berkeadilan. Penciptaan lapangan kerja di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti nilai tukar mata uang, suku bunga perbankan, posisi kebijakan fiskal, inflasi, dan perdagangan. Indonesia memiliki berbagai anugerah berlimpah sebagai sumber potensial penyumbang pertumbuhan ekonomi, yakni lahan yang sangat luas, sumber daya alam, meningkatnya masyarakat kelas menengah, dan konsumsi dalam negeri yang kuat, kedekatan geografis dengan tujuan-tujuan utama ekspor, serta jumlah tenaga kerja yang besar.

Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam rangka perbaikan kesejahteraan pekerja/karyawan secara menyeluruh, kebijakan di bidang perlindungan tenaga kerja diarahkan kepada perbaikan upah, persyaratan kerja, kondisi kerja dan jaminan sosial lainnya.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang perbaikan kesejahteraan pekerja/karyawan dilakukan dengan usaha pengumpulan berbagai informasi yang berkaitan dengan keadaan tingkat hidup pekerja/karyawan dalam bentuk publikasi yang disebut Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan. Indikator ini disusun sedemikian rupa sehingga merupakan cerminan dari Statistik Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan.

Publikasi ini menyajikan indikator yang masih sederhana, baik dalam bentuk maupun cakupannya. Indikator yang disajikan meliputi :

- Pekerja/karyawan dan penduduk yang bekerja.
- Pekerja/karyawan menurut sektor/lapangan usaha.
- Pekerja/karyawan menurut pendidikan.
- Rata-rata upah/gaji bersih pekerja/karyawan.
- Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi.
- Pasar Tenaga Kerja.

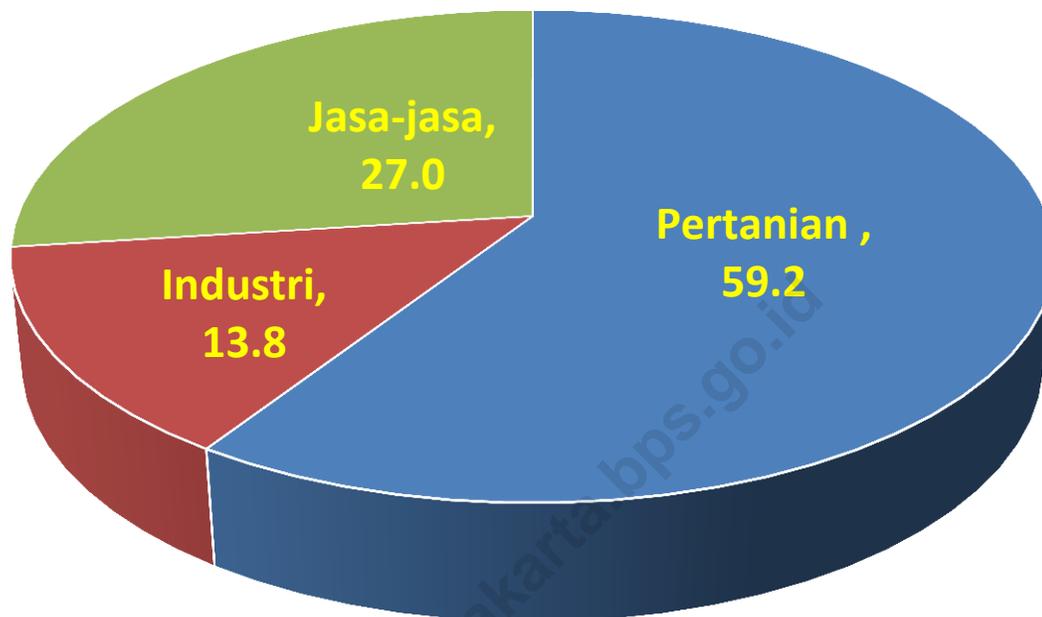
Tabel A. Sejarah Sakernas 1976 - 2017

Periode	Waktu Pelaksanaan	Level Estimasi	Cakupan
(1)	(2)	(3)	(4)
1976 - 1985	Tidak Setiap Tahun	Provinsi	Indonesia*
1986 - 1989	Triwulanan	Provinsi	Indonesia*
1990 - 1993	Triwulanan	Provinsi	Indonesia*
1994 - 1999	Tahunan	Provinsi	Indonesia*
2000	Semesteran	Pulau	Indonesia**
2001	Semesteran	Pulau	Indonesia
2002 - 2004	Triwulanan	Provinsi	Indonesia
2005 - Februari 2007	Semesteran	Provinsi	Indonesia
Agustus 2007 - 2010	Semesteran	Kabupaten/kota	Indonesia
2011 - 2014	Triwulanan	Kabupaten/kota	Indonesia
2015	Semesteran	Kabupaten/kota	Indonesia
2016	Semesteran	Provinsi	Indonesia
2017	Semesteran	Kabupaten/kota	Indonesia

*) Tahun 1976 - 1978 Tanpa Timor Timur

***) Tahun 2000 Tanpa Maluku

**Grafik B. Persentase Pekerja Perempuan Dengan Status Pekerja Keluarga/
Tak Dibayar Menurut Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta Agustus 2017**



II. SUMBER DATA

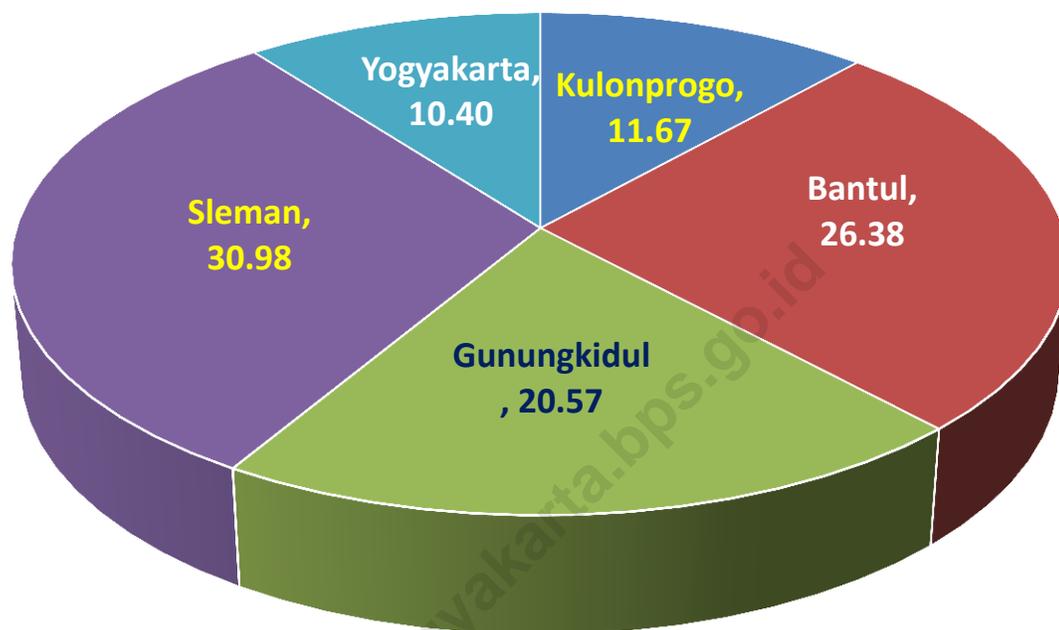
Sumber data dalam publikasi ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Dilihat dari perkembangannya, Sakernas telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali dilaksanakan tahun 1976, baik cakupan sampel, wilayah dan rumah tangga maupun periode pencacahan. Sakernas pada tahun 1986 sampai dengan 1993 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu Triwulan I (Februari), Triwulan II (Mei), Triwulan III (Agustus) dan Triwulan IV (November), tahun 1994 sampai dengan 1999 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2000 sampai dengan 2001 secara semesteran (Februari dan Agustus), kemudian tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara semesteran juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan 2010 Sakernas dilakukan secara semesteran, Semester I (Februari) dan Semester II (Agustus).

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November untuk mendapatkan angka estimasi provinsi dan pada bulan Agustus dilakukan penambahan sampel untuk angka estimasi kabupaten/kota. Unit pencacahannya adalah rumah tangga dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Pada November 2014 karena adanya berbagai alasan Sakernas tidak dilaksanakan dan mulai tahun 2015 diperkirakan sampai tahun 2018 Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun).

Di samping sumber data tersebut, digunakan juga data dari publikasi BPS lainnya, seperti D.I. Yogyakarta Dalam Angka dan data sekunder yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

Grafik C. Persentase Jumlah Pekerja Menurut Kabupaten/kota di D.I Yogyakarta, Agustus 2017



III. KONSEP DAN DEFINISI

1. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia atau wilayah observasi selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
2. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
3. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
4. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
5. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
6. **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ usaha/ perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.
7. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:
 - a. **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar,

termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. **Buruh/Karyawan/Pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/ lembaga, boleh lebih dari satu.
- e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
- f. **Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima

upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).

g. **Pekerja keluarga/tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:

- ✓ Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.
- ✓ Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar.

8. **Jenis pekerjaan/jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini, didasarkan atas Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002 yang mengacu kepada ISCO 88.

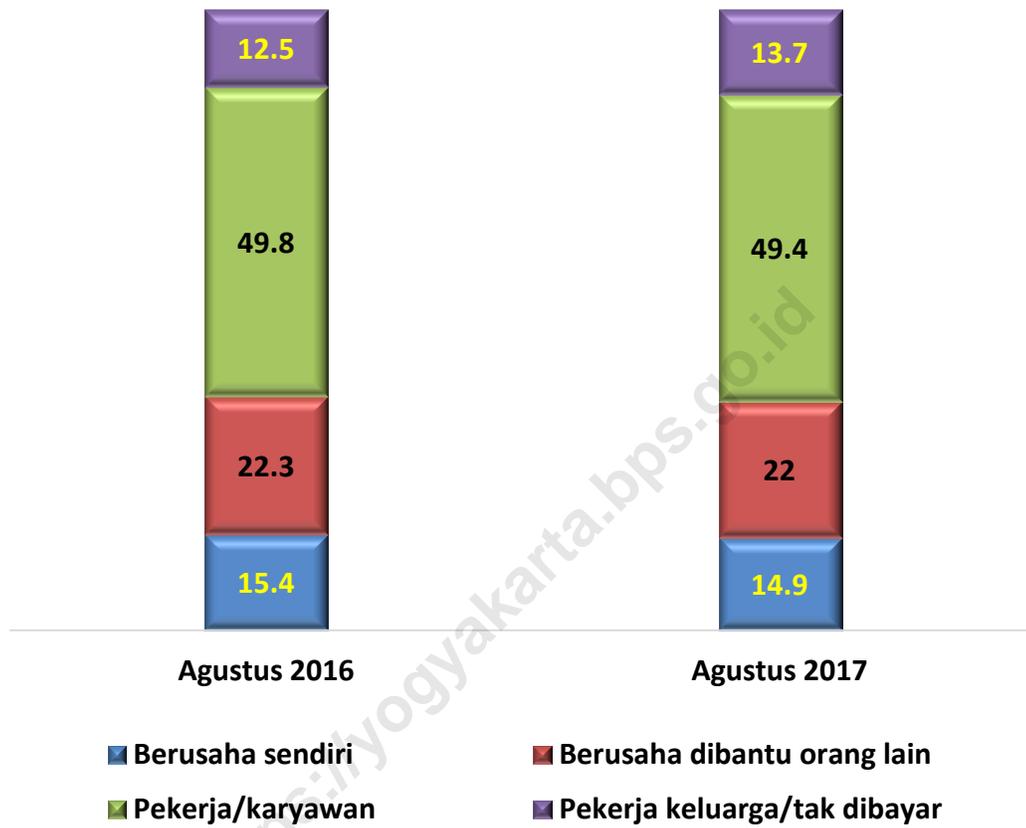
9. **Upah/gaji bersih** adalah upah/gaji bersih yang biasanya diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan/pegawai baik berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan. Upah/gaji bersih yang

dimaksud adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan, iuran wajib, pajak penghasilan dan lain sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.

10. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah formal dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

Grafik D. Persentase Jumlah Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di D.I. Yogyakarta Agustus 2016 - 2017



IV. PEKERJA/KARYAWAN DAN PENDUDUK YANG BEKERJA

Dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS, penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang dikategorikan menjadi dua kelompok kegiatan yaitu penduduk yang aktif secara ekonomi dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi. Penduduk yang aktif secara ekonomi disebut dengan Angkatan Kerja dan Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi disebut Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan dan pengangguran, seperti penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Bukan Angkatan Kerja yaitu penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau menganggur, yaitu penduduk yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Informasi yang diperoleh dari Sakernas adalah jumlah penduduk bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga dan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan termasuk status pekerjaan. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam pekerjaannya yang dikategorikan menjadi pekerja/karyawan tetap dan pekerja bebas. Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama dikategorikan menjadi berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tetap/tidak tetap atau anggota rumah tangga, dan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga.

Dari kategori menurut status pekerjaan dapat diperoleh informasi keadaan dinamika pasar kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Kemajuan pembangunan mengharapkan terjadinya pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan sektor jasa, peningkatan jumlah pekerja digaji/dibayar (buruh/ karyawan/pegawai) serta penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian.

Pekerja/karyawan tetap adalah seseorang yang bekerja pada perusahaan/instansi atau perorangan, baik pemerintah maupun swasta, secara tetap dengan menerima upah/gaji berupa uang maupun barang. Sementara pekerja/karyawan yang memiliki majikan tidak tetap yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir, dianggap sebagai pekerja bebas. Khusus sektor konstruksi batasan waktunya lebih lama yaitu dalam tiga bulan terakhir. Pekerja bebas terdiri atas pekerja bebas pertanian dan pekerja bebas non pertanian.

Dengan menggunakan penimbang angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035, hasil Sakernas Agustus 2017 diketahui sekitar 49,4 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas di D.I. Yogyakarta yang bekerja, berstatus pekerja/karyawan yaitu sebagai pekerja/karyawan tetap sebesar 40,2 persen dan pekerja bebas sebesar 9,2 persen. Persentase pekerja/karyawan sebesar 49,4 persen pada Agustus 2017 tersebut mengalami penurunan 0,4 persen poin jika dibandingkan kondisi Agustus 2016 sebesar 49,8 persen, penurunan ini terjadi karena adanya penurunan pekerja/karyawan perempuan sebesar 0,9 persen poin dari 41,4 persen tahun 2016 menjadi 40,5 persen tahun 2017 walaupun pekerja/karyawan laki-laki meningkat 0,2 persen poin dari 56,5 persen tahun 2016 menjadi 56,7 persen tahun 2017 (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama di D.I. Yogyakarta Agustus 2016 - 2017

Status Pekerjaan	Agustus 2016			Agustus 2017		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	14,3	16,7	15,4	12,8	17,6	14,9
2	25,6	18,3	22,3	25,6	17,6	22,0
3	56,5	41,4	49,8	56,7	40,5	49,4
4	3,6	23,6	12,5	4,9	24,3	13,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.1	45,9	36,2	41,6	43,1	36,7	40,2
3.2	10,6	5,2	8,2	13,6	3,8	9,2

Sumber: Sakernas Agustus 2016 - 2017

Keterangan :

1 = Berusaha sendiri ;

2 = Berusaha dibantu orang lain ;

3 = Pekerja/karyawan

(3.1 = pekerja tetap dan 3.2 = pekerja bebas) ;

4 = Pekerja keluarga/tak dibayar ;

L = Laki-laki ; P = Perempuan

Tabel 4.1 juga menggambarkan bahwa pada tahun 2017 total pekerja/karyawan (49,4 persen) di D.I Yogyakarta terdapat sebesar 40,2 persen pekerja tetap sisanya sebesar 9,2 persen adalah pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun bukan pertanian. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2016 sebesar 41,6 persen maka angka pekerja tetap mengalami penurunan sebesar 1,4 persen poin, hal ini terjadi karena terjadinya penurunan persentase pekerja/karyawan laki-laki sebesar 2,8 persen poin (45,9 persen pada Agustus 2016 menjadi 43,1 persen pada Agustus 2017) atau lebih besar dibandingkan peningkatan persentase pekerja/karyawan perempuan hanya sebesar 0,5 persen poin (36,2 persen pada Agustus 2016 menjadi 36,7 persen pada Agustus 2017). Sebaliknya untuk pekerja bebas yang sebesar 8,2 persen pada tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,0 persen poin, hal ini terjadi karena peningkatan persentase pekerja bebas laki-laki sebesar 3,00 persen (10,6 persen pada Agustus 2016 menjadi 13,6 persen pada Agustus 2017) atau lebih besar dari penurunan pekerja bebas perempuan sebesar 1,4 persen (5,2 persen pada Agustus 2016 menjadi 3,8 persen pada Agustus 2017).

Pada Agustus 2016, dari seluruh penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja, terdapat sebesar 56,5 persen berstatus sebagai pekerja/karyawan dan pada Agustus 2017 mengalami peningkatan menjadi 56,7 persen. Sebaliknya untuk perempuan pada periode yang sama pekerja/karyawan mengalami penurunan dari 41,4 persen menjadi 40,5 persen. Dari 56,7 persen pekerja/karyawan laki-laki pada Agustus 2017, yang berstatus sebagai pekerja tetap sebesar 43,1 persen dan 13,6 persen sebagai pekerja bebas, sedangkan untuk pekerja/karyawan perempuan sebesar 40,5 persen terdiri dari 36,7 persen pekerja/karyawan tetap dan 3,8 persen

pekerja/karyawan bebas. Pada Agustus 2016 penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas mencapai 8,2 persen dan meningkat pada Agustus 2017 menjadi 9,2 persen. Pekerja perempuan dengan status pekerja keluarga/tak dibayar mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen poin dari 23,6 persen menjadi 24,3 persen pada Agustus 2017.

Perbedaan yang cukup nyata antara pekerja laki-laki dan perempuan dalam status pekerja keluarga/tidak dibayar adalah bahwa pekerja laki-laki kurang dari 5 persen, sedangkan pekerja perempuan hampir 25 persen atau hampir 5 kali lipatnya. Pekerja laki-laki dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar mengalami peningkatan 1,3 persen poin atau sebesar 3,6 persen pada Agustus 2016 menjadi 4,9 persen pada Agustus 2017.

Tabel 4.2. Persentase pekerja perempuan dengan status pekerja keluarga/tak dibayar menurut sektor/lapangan usaha di D.I. Yogyakarta Agustus 2016 - 2017

Sektor	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<i>Agriculture/A/Pertanian</i>	58,7	59,2
<i>Manufacture/M/Industri, Pertambangan, Kontruksi</i>	10,0	13,8
<i>Service/S/Perdagangan, Transportasi, Keuangan & Jasa</i>	31,3	27,0
Persentase Total	100,0	100,0
Persentase Perempuan Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	23,6	24,3

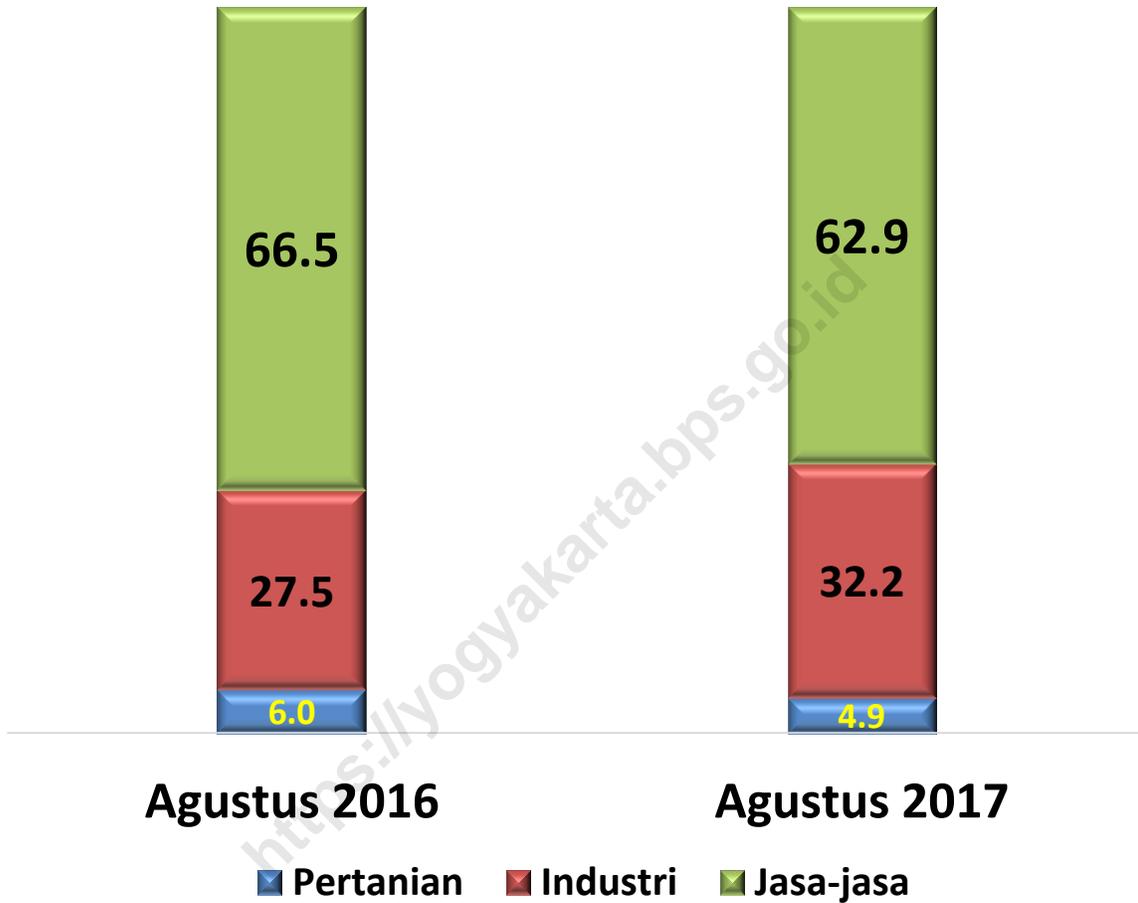
Sumber: Sakernas Agustus 2016 - 2017

Komposisi penyerapan pekerja perempuan dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar menurut sektor/lapangan usaha terjadi pergeseran, pada Agustus 2017 sektor pertanian (A) mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,5 persen poin atau dari 58,7 persen pada Agustus 2016 menjadi 59,2 persen pada Agustus 2017. Hal yang sama terjadi pada sektor Industri,

pertambangan, konstruksi (M) meningkat sebesar 3,8 persen poin dari sebesar 10,0 persen pada Agustus 2016 menjadi 13,8 persen pada Agustus 2017. Namun, untuk sektor perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa (S) justru mengalami penurunan 4,3 persen poin dari sebesar 31,3 persen pada Agustus 2016 menjadi 27,0 persen pada Agustus 2017. Perempuan dengan status pekerja keluarga/tak dibayar selama dua tahun terakhir di D.I. Yogyakarta banyak terserap di sektor pertanian karena sektor pertanian sebagai sektor informal tidak mensyaratkan pendidikan, latihan, pengalaman/keahlian kerja, upah rendah, fleksibilitas waktu dan tidak meninggalkan tugas utama perempuan untuk mengurus rumah tangga.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

Grafik E. Persentase Pekerja/karyawan Menurut Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - 2017



V. PEKERJA/KARYAWAN MENURUT SEKTOR/LAPANGAN USAHA

Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Untuk kesederhanaan hasil dan pembahasan, sektor/lapangan usaha yang ada dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu Sektor A atau Sektor *Agriculture* (Pertanian), Sektor M atau Sektor *Manufacture* (Pertambangan/penggalian, Industri pengolahan, Listrik/Gas/Air, dan Konstruksi), dan Sektor S atau Sektor *Services* (Perdagangan, Transportasi, Keuangan dan Jasa-jasa).

Sektor S sampai dengan Agustus 2017 masih merupakan sektor yang terbanyak menyerap pekerja/karyawan dengan kontribusi sebesar 62,9 persen (menurun dibandingkan Agustus 2016 sebesar 66,5 persen) diikuti sektor M sebesar 32,2 persen dan terendah sektor A sebesar 4,9 persen. Tabel 5.1 menunjukkan persentase pekerja/karyawan perempuan yang terserap di sektor A dan sektor S lebih besar dari pada persentase laki-laki yang terserap di sektor yang sama dengan perbandingan 6,0 persen berbanding 4,3 persen untuk sektor A dan 73,0 persen berbanding 57,0 persen untuk sektor S. Sebaliknya di sektor M persentase pekerja perempuan yang terserap lebih rendah dibandingkan persentase pekerja laki-laki dengan perbandingan 21,0 persen berbanding 38,7 persen.

Secara umum terjadi pergeseran jumlah penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor selama kurun waktu 1 tahun. Sektor A dan S mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,1 persen poin (dari 6,0 persen pada Agustus 2016 menjadi 4,9 persen pada Agustus 2017) dan 3,6 persen poin (dari 66,5 persen pada Agustus 2016 menjadi 62,9 persen pada Agustus 2017), sedangkan untuk sektor M mengalami peningkatan 4,7 persen poin (dari 27,5 persen pada Agustus 2016 menjadi 32,2 persen pada Agustus 2017). Hal ini sesuai dengan misi nomor 2 D.I. Yogyakarta yang tercantum dalam RPJM 2012-2017 yaitu menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan

kreatif menuju visi “D.I. Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”.

Tabel 5.1 Persentase Pekerja/karyawan Menurut Sektor di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - 2017

Sektor	Agustus 2016			Agustus 2017		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	6,3	5,7	6,0	4,3	6,0	4,9
M	34,4	15,6	27,5	38,7	21,0	32,2
S	59,3	78,7	66,5	57,0	73,0	62,9
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Sakernas Agustus 2016 - 2017

Keterangan :

A = Sektor *Agriculture* (Pertanian).

M = Sektor *Manufacture* (Pertambangan, Industri, Listrik dan Konstruksi).

S = Sektor *Services* (Perdagangan, Transportasi, Keuangan dan Jasa-jasa).

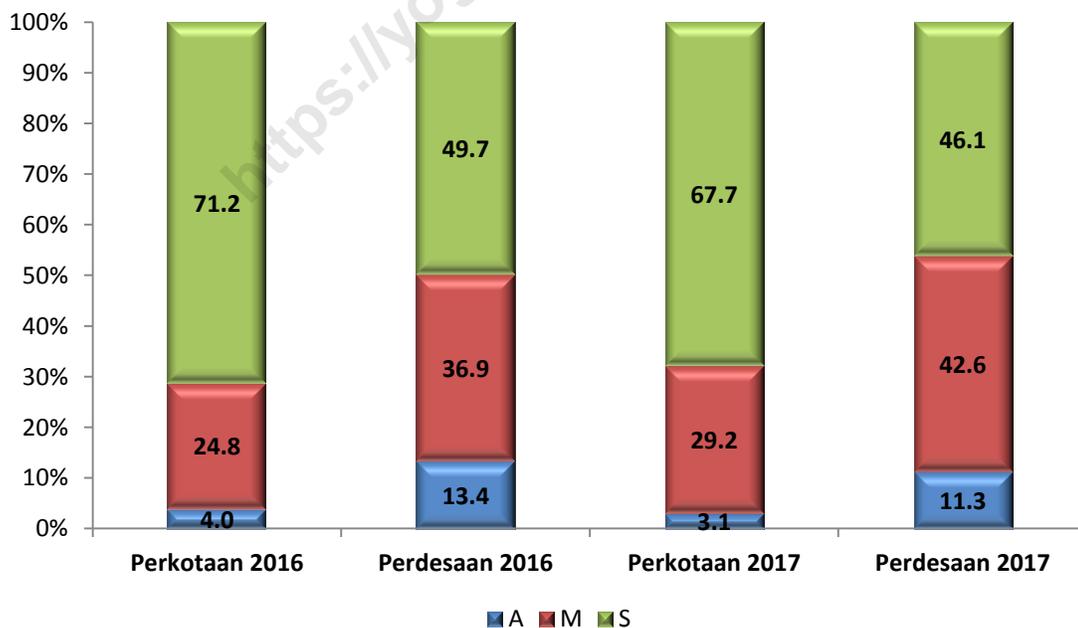
Tabel 5.1 juga memperlihatkan perkembangan persentase pekerja/karyawan menurut jenis kelamin di masing-masing sektor. Untuk pekerja/karyawan perempuan, terjadi peningkatan persentase penyerapan pekerja/karyawan pada sektor A dan sektor M masing-masing sebesar 0,3 persen poin (dari 5,7 persen pada Agustus 2016 menjadi 6,0 persen pada Agustus 2017) dan sebesar 5,4 persen poin (dari 15,6 persen pada Agustus 2016 menjadi 21,0 persen pada Agustus 2017, sedangkan untuk sektor S terjadi penurunan penyerapan pekerja/karyawan sebesar 5,7 persen poin (dari 78,7 persen pada Agustus 2016 menjadi 73,0 persen pada Agustus 2017).

Pergeseran komposisi menurut lapangan usaha juga terjadi pada pekerja/karyawan laki-laki yaitu terjadi perubahan kontribusi pada sektor A, sektor M dan sektor S serta terjadi peningkatan kontribusi pada sektor M. Untuk sektor A

dan S terjadi penurunan masing-masing 2,0 persen poin (dari 6,3 persen pada Agustus 2016 menjadi 4,3 persen pada Agustus 2017) dan 2,3 persen poin (dari 59,3 persen pada Agustus 2016 menjadi 57,0 persen pada Agustus 2017), sedangkan untuk sektor M, pekerja/karyawan laki-laki mengalami kenaikan kontribusi sebesar 4,3 persen poin (dari 34,4 persen pada Agustus 2016 menjadi 38,7 persen pada Agustus 2017).

Pada Agustus 2017, di daerah perkotaan proporsi pekerja/karyawan yang bekerja di sektor S masih sangat dominan sebesar 67,7 persen, diikuti sektor M sebesar 29,2 persen dan terendah sektor A sebesar 3,1 persen. Komposisi yang sama terjadi untuk wilayah pedesaan dengan kontribusi sektor S sebesar 46,1 persen diikuti sektor M sebesar 42,6 persen dan sektor A sebesar 11,3 persen.

Gambar 5.1. Persentase Pekerja/Karyawan menurut Lapangan Usaha dan Daerah Tempat Tinggal di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - Agustus 2017



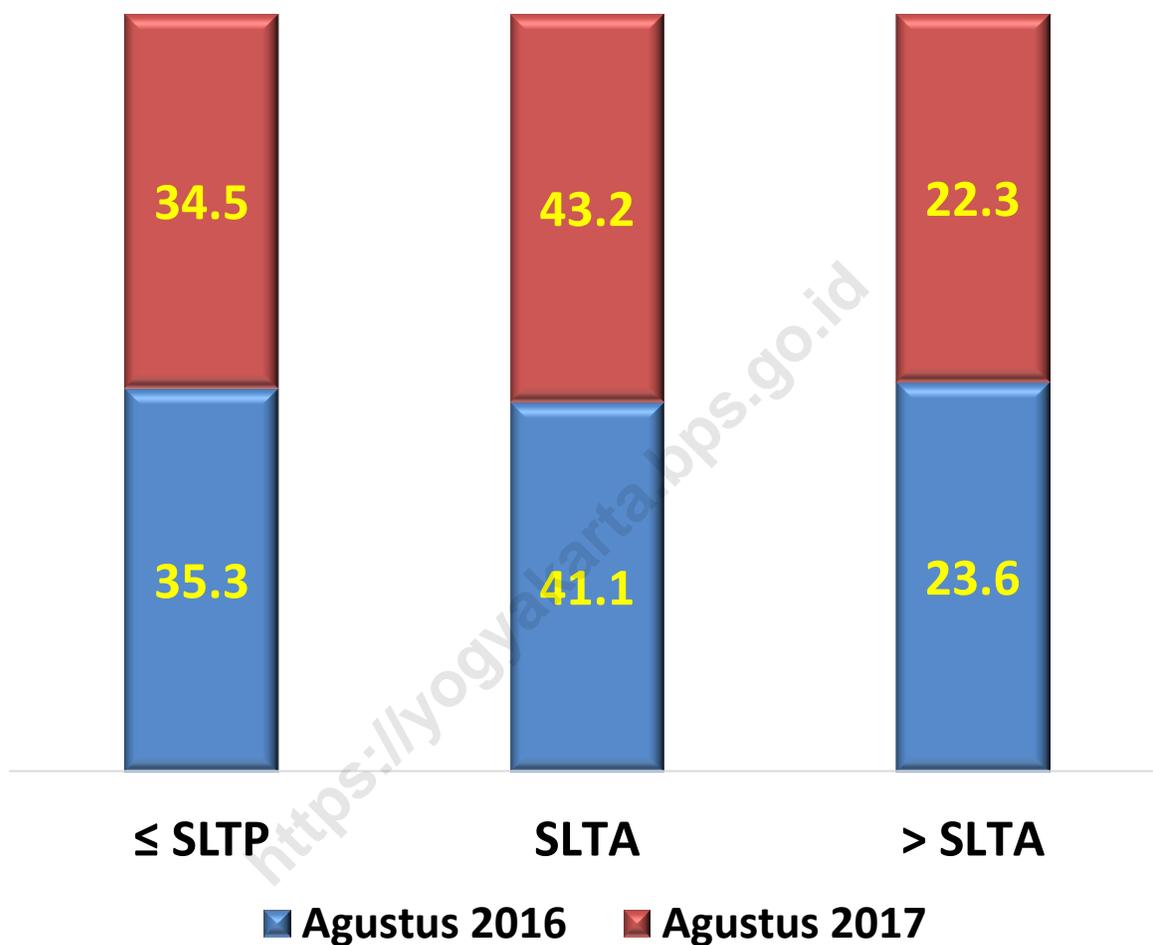
Sumber: Sakernas Agustus 2016 - 2017

Gambar 5.1 juga menjelaskan terjadi perbedaan pola pergeseran pada masing-masing sektor selama periode Agustus 2016 - Agustus 2017. Untuk sektor S

yang memiliki kontribusi paling besar dalam penyerapan pekerja/karyawan terjadi penurunan persentase baik di wilayah perkotaan (dari 71,2 persen menjadi 67,7 persen) maupun wilayah pedesaan (dari 49,7 persen menjadi 46,1 persen). Hal yang sama terjadi pada sektor M yaitu terjadi kenaikan kontribusi pekerja/karyawan baik untuk wilayah perkotaan (dari 24,8 persen menjadi 29,2 persen) maupun wilayah pedesaan (dari 36,9 persen menjadi 42,6 persen).

Pada periode Agustus 2016 - 2017 terjadi hal yang berbeda untuk sektor A dibandingkan dengan sektor S dan M yaitu mengalami penurunan kontribusi pekerja/karyawan untuk wilayah perkotaan (dari 71,2 persen menjadi 67,7 persen) dan juga mengalami penurunan kontribusi pekerja/karyawan (dari 49,7 persen menjadi 46,1 persen) untuk wilayah pedesaan.

Grafik F. Pekerja/Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - 2017



VI. PEKERJA/KARYAWAN MENURUT PENDIDIKAN

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pekerja/karyawan. Tingkat pendidikan pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2017 didominasi tingkat pendidikan SLTA keatas sebesar 65,5 persen (43,2 persen SLTA dan 22,3 persen diatas SLTA), sisanya sebesar 34,5 persen berpendidikan SLTP ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pekerja/karyawan di D.I Yogyakarta cukup bagus sehingga diharapkan pekerja/karyawan tersebut memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang baik dalam upaya untuk menghasilkan produksi yang tinggi.

Kondisi pekerja/karyawan pada Agustus 2017 jika dilihat perbandingan menurut jenis kelamin, maka pekerja/karyawan laki-laki memiliki persentase lebih tinggi dibanding pekerja/karyawan perempuan pada tingkat pendidikan SLTA dengan perbandingan 45,7 persen berbanding 38,8 persen serta tingkat pendidikan SLTP ke bawah dengan perbandingan 36,3 persen berbanding 31,4 persen. Sebaliknya, untuk tingkat pendidikan diatas SLTA, pekerja/karyawan laki-laki memiliki persentase lebih kecil dibandingkan pekerja/karyawan perempuan dengan perbandingan 18,0 persen berbanding 29,8 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pekerja/karyawan perempuan di D.I Yogyakarta lebih baik dibandingkan pekerja/karyawan laki-laki. Fenomena ini berkaitan dengan tradisi di D.I Yogyakarta bahwa laki-laki menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehingga laki-laki harus bekerja keluar rumah walaupun dengan upah/gaji yang lebih rendah dikarenakan kualifikasinya dalam hal ini pendidikan yang lebih rendah, sedangkan untuk perempuan akan lebih mengutamakan mengurus rumah tangga, sehingga ketika tingkat pendidikannya sudah tinggi dia akan bekerja keluar rumah dengan penghasilan yang lebih tinggi.

Jika dilihat pergeseran struktur tingkat pendidikan pekerja/karyawan periode Agustus 2016 – Agustus 2017 menunjukkan kecenderungan stabil walaupun terjadi perubahan sedikit di setiap tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan SLTP ke bawah dan diatas SLTA mengalami penurunan masing-masing 0,8 persen poin (dari 35,3 persen menjadi 34,5 persen) dan 1,3 persen poin (dari 23,6 persen menjadi 22,3 persen). Sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTA mengalami kenaikan sebesar 2,1 persen poin (dari 23,6 persen menjadi 22,3 persen).

Tabel 6.1. Pekerja/Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 – 2017

Tingkat Pendidikan	Agustus 2016			Agustus 2017		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
≤ SLTP	36,9	32,6	35,3	36,3	31,4	34,5
SLTA	44,6	35,1	41,1	45,7	38,8	43,2
> SLTA	18,5	32,3	23,6	18,0	29,8	22,3
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

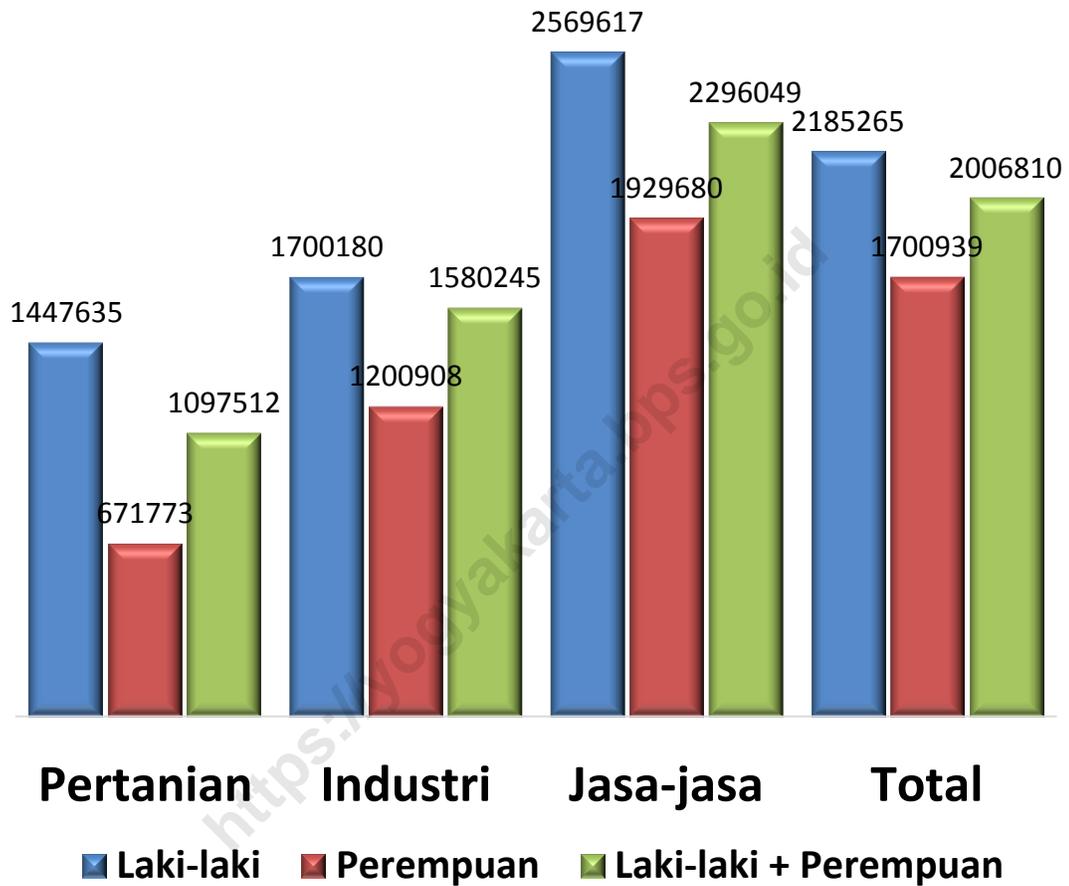
Sumber: Sakernas Agustus 2016 – 2017

Untuk pergeseran struktur tingkat pendidikan pekerja/karyawan menurut jenis kelamin terlihat bahwa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki terjadi penurunan persentase untuk tingkat pendidikan SLTP ke bawah sebesar 0,6 persen (dari 36,9 persen menjadi 36,3 persen) dan tingkat pendidikan diatas SLTA sebesar 0,5 persen (dari 18,5 persen menjadi 18,0 persen), sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTA mengalami kenaikan persentase sebesar 1,1 persen (dari 44,6 persen menjadi 45,7 persen). Pola yang sama juga terjadi untuk

perempuan yaitu mengalami penurunan untuk tingkat pendidikan SLTP ke bawah sebesar 1,2 persen (dari 32,6 persen menjadi 31,4 persen) dan tingkat pendidikan di atas SLTA sebesar 2,5 persen (dari 32,3 persen menjadi 29,8 persen) namun di kelompok tingkat pendidikan SLTA mengalami peningkatan sebesar 3,7 persen (dari 35,1 persen menjadi 38,8 persen). Selengkapnya dijelaskan oleh Tabel 6.1.

Meningkatnya persentase pekerja/karyawan berpendidikan SLTA diduga karena adanya kecenderungan lulusan SLTA dan sederajat tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan memilih bekerja karena menjadi tulang punggung keluarga atau membantu penghasilan rumah tangga. Sekarang ini banyak perusahaan, pelaku usaha, instansi pemerintah dan swasta memberlakukan syarat pelamar kerja dengan pendidikan minimal SLTA dan sederajat.

Grafik G. Rata-Rata Upah/Gaji Sebulan Menurut Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2017



VII. RATA-RATA UPAH/GAJI PEKERJA/KARYAWAN

Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja/karyawan serta keluarganya, memerlukan berbagai kebijakan dalam penetapan tingkat upah/gaji pekerja/karyawan. Banyak faktor yang menentukan besarnya upah/gaji seorang pekerja/ karyawan, antara lain lapangan usaha, pendidikan, jam kerja dan pengalaman kerja.

Tabel 7.1 menunjukkan secara keseluruhan rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan sebulan menurut sektor/lapangan usaha selama 2 tahun terakhir meningkat yaitu Rp. 1.827.969,- pada Agustus 2016 menjadi Rp. 2.006.810,- pada Agustus 2017. Jika dilihat menurut jenis kelamin pada Agustus 2016, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan perempuan sebesar Rp. 1.700.939,- atau lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar Rp. 2.185.265,- sebulan.

Tabel 7.1. Rata-Rata Upah/Gaji Sebulan menurut Sektor/Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta, Agustus 2016 - 2017

Lapangan Usaha	Agustus 2016			Agustus 2017		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	1.177.516	608.609	979.477	1.447.635	671.773	1.097.512
M	1.850.391	1.350.987	1.744.602	1.700.180	1.200.908	1.580.245
S	2.166.141	1.650.701	1.939.619	2.569.617	1.929.680	2.296.049
Total	1.995.370	1.544.665	1.827.969	2.185.265	1.700.939	2.006.810

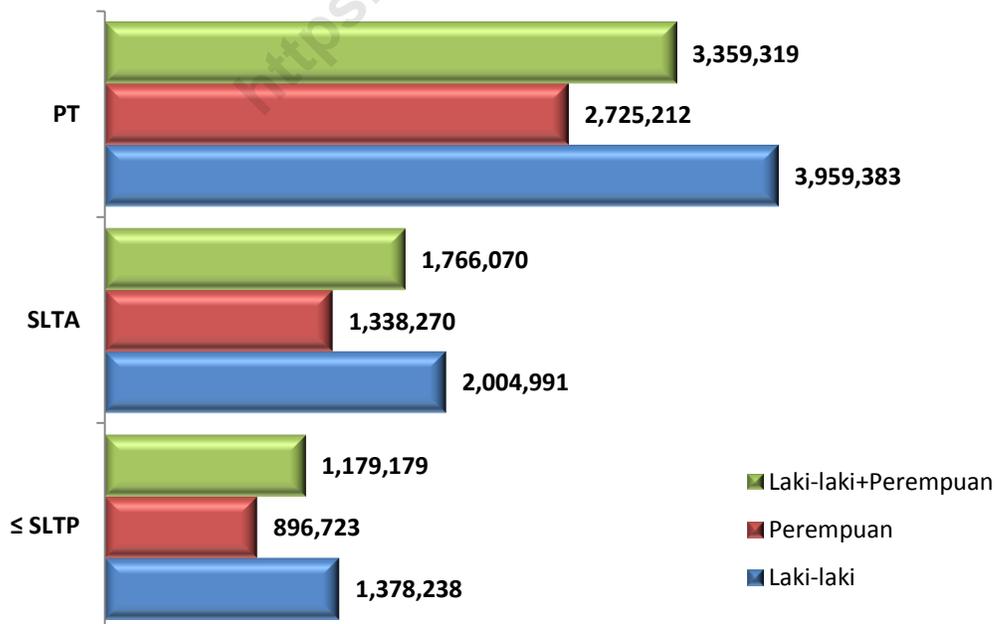
Sumber: Sakernas Agustus 2016 - 2017

Dari sudut pandang sektor/lapangan usaha pada Agustus 2017, rata-rata upah/gaji tertinggi diterima oleh pekerja/karyawan di sektor S sekitar Rp. 2.296.049,- diikuti oleh sektor M sebesar Rp. 1.580.245,- dan terendah sektor A sebesar Rp. 1.097.512,-. Pola yang sama terjadi untuk laki-laki maupun perempuan

yaitu tertinggi sektor S diikuti sektor M dan terendah sektor A. Tabel 7.1 juga menjelaskan bahwa upah/gaji pekerja/karyawan laki-laki di D.I Yogyakarta lebih besar dibandingkan dengan pekerja/karyawan perempuan di semua sektor.

Ini menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap pekerja/karyawan laki-laki dan perempuan dalam penentuan tingkat upah/gaji yang diberikan, ini diduga karena perempuan yang mempunyai tugas pokok sebagai ibu rumah tangga jika terpaksa bekerja hanya sekedar membantu, sehingga mungkin tidak mencurahkan tenaga/waktunya sepenuhnya khususnya di pekerjaan yang sifatnya informal, dan ini merupakan salah satu gambaran kaum perempuan menghadapi beragam masalah dalam mengakses pendidikan dan pelatihan, dalam mendapatkan pekerjaan, dan dalam memperoleh perlakuan yang sama di tempat kerja.

Gambar 7.1. Rata-Rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2017



Sumber: Sakernas Agustus 2017

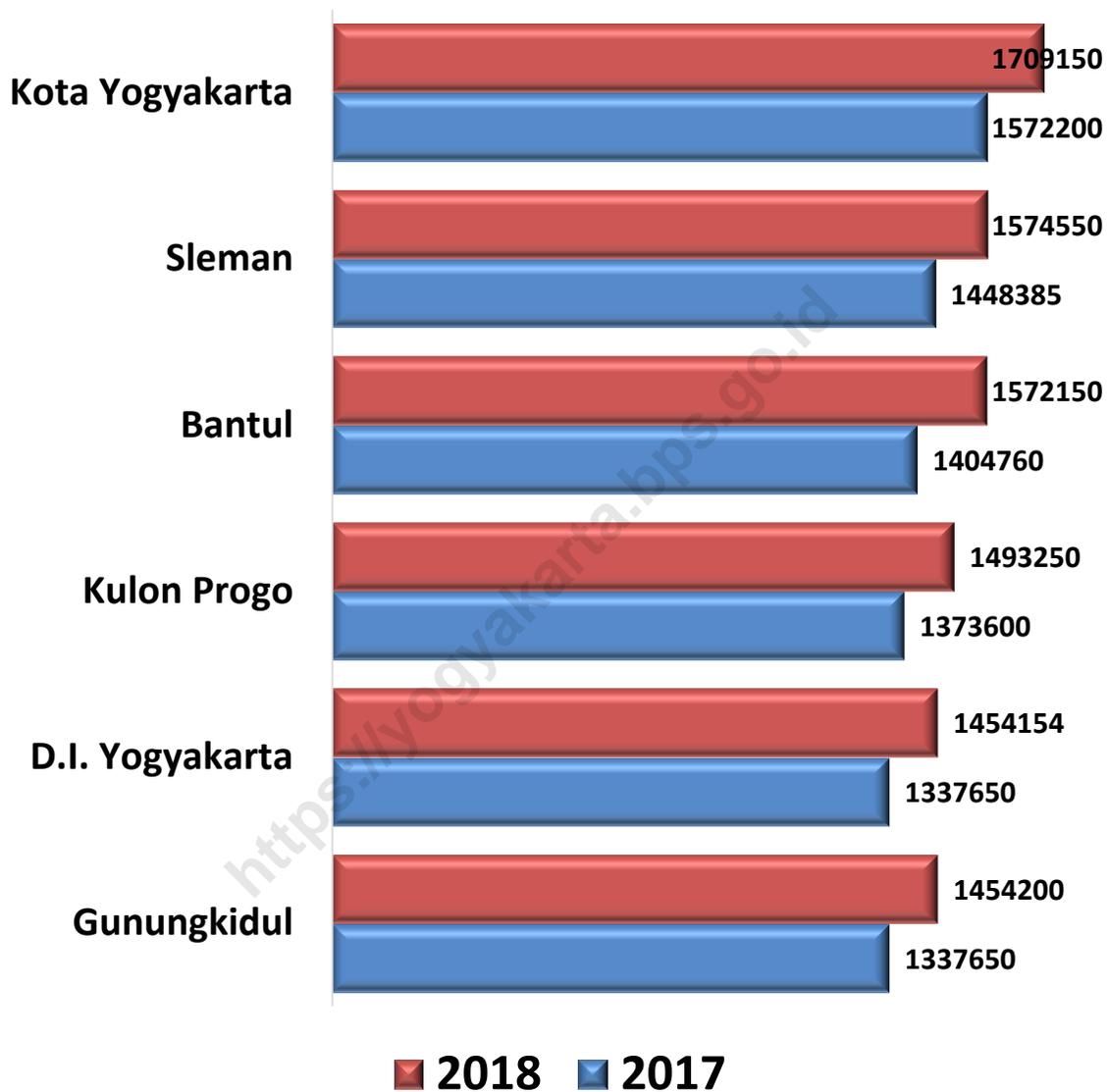
Faktor lain yang dapat menentukan besarnya upah/gaji adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan pekerja/karyawan. Para pekerja/karyawan yang hanya memiliki pendidikan SLTA ke bawah, rata-rata upah/gaji yang diterima masih sangat rendah, yaitu berada di bawah rata-rata upah/gaji dari pekerja secara keseluruhan.

Berbeda dengan mereka yang berpendidikan lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi, mereka mempunyai kondisi yang lebih baik. Rata-rata upah/gaji yang diterima berada di atas rata-rata keseluruhan yaitu sebesar Rp 3.959.383,- untuk pekerja/karyawan laki-laki serta sebesar Rp 2.725.212,- untuk pekerja/karyawan perempuan. Rata-rata upah/gaji yang diterima mereka yang berpendidikan tinggi sekitar dua kali lipat rata-rata upah/gaji secara keseluruhan pada Agustus 2017.

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja/karyawan semakin tinggi pula rata-rata upah/gaji yang diterima. Dengan demikian, salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup pekerja/karyawan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dilakukan melalui pembangunan di bidang pendidikan. Lebih spesifik lagi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan kesempatan kerja. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang kemudian akan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Korelasi antara pendidikan dengan pendapatan lebih signifikan di negara yang sedang membangun.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

Grafik H. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/kota dan Upah Minimum Provinsi di D.I. Yogyakarta Tahun 2017 - 2018



VIII. UPAH MINIMUM KAB/KOTA DAN UPAH MINIMUM PROVINSI

Data upah minimum yang akan disajikan disini menggunakan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi. Menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur penting dari upah minimum (Sumarsono, 2003) yaitu :

- a) Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali diterima bekerja.
- b) Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Sasaran dari kebijakan upah minimum adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Kebijakan upah minimum adalah untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktivitas pekerja, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien.

Selama lebih dari 40 tahun sejak upah minimum pertama kali diberlakukan, Indonesia telah 3 kali mengganti standar kebutuhan hidup sebagai dasar penetapan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup tersebut meliputi: kebutuhan fisik minimum (KFM) yang berlaku tahun 1969 - 1995; Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang berlaku Tahun 1996 - 2005 dan kemudian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku tahun 2006-hingga sekarang. Di samping itu, pengertian (definisi) upah minimum, dan istilah-istilahnya juga mengalami beberapa kali perubahan seiring perkembangan dan perubahan regulasi.

Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan melalui proses panjang. Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari unsur birokrat, akademisi, buruh dan

pengusaha. UMP D.I. Yogyakarta pertama kali ditetapkan tahun 2000 sebesar Rp 194.500,-/bulan, perkembangan UMP setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) mulai tahun 2013 ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota sedangkan untuk UMP D.I. Yogyakarta diambil dari nilai Upah Minimum Kabupaten/kota yang terendah di D.I. Yogyakarta yakni UMK Gunungkidul. Tabel 8.1 menunjukkan perkembangan UMP/K dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 yang cenderung terus meningkat.

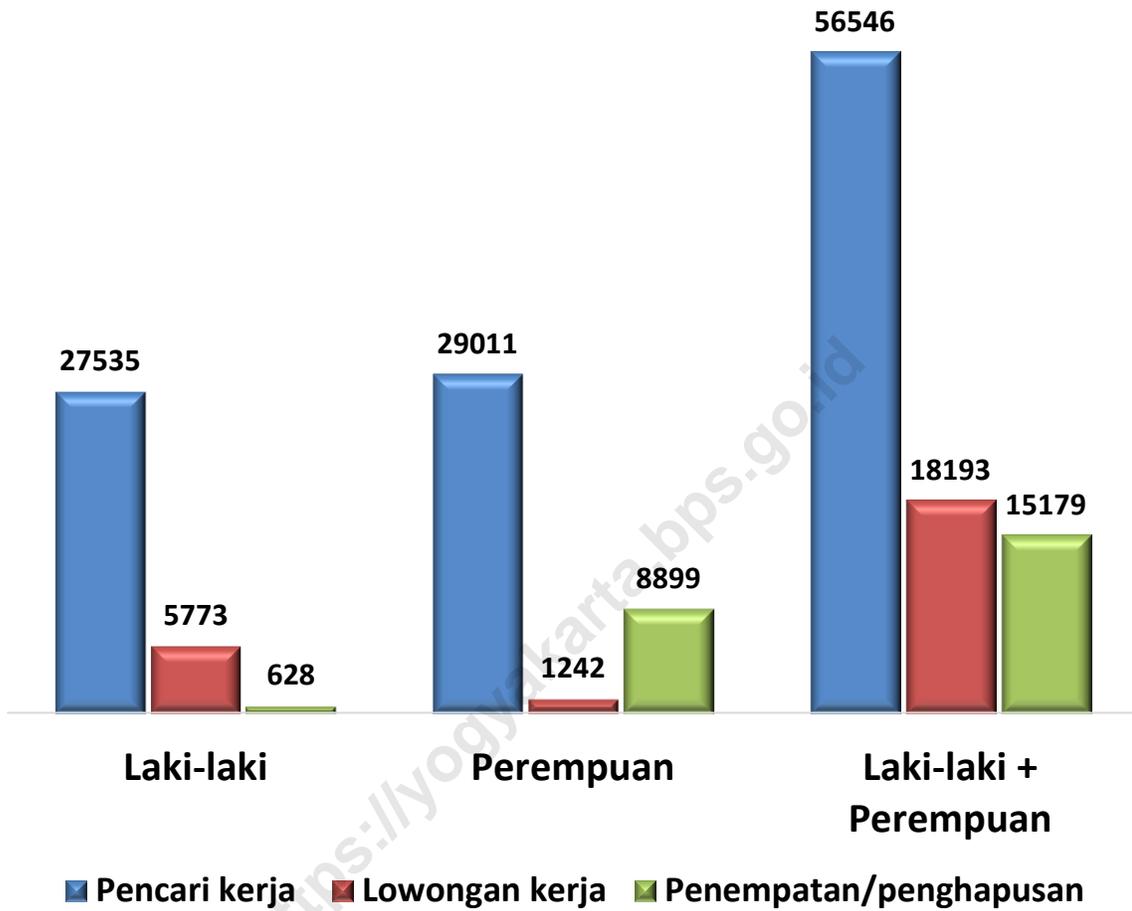
Tabel 8.1. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/kota dan Upah Minimum Provinsi di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 - 2018

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gunungkidul	988.500	1.108.249	1.237.700	1.337.650	1.454.200
Kulon Progo	1.069.000	1.138.000	1.268.870	1.373.600	1.493.250
Bantul	1.125.000	1.163.800	1.297.700	1.404.760	1.572.150
Sleman	1.127.000	1.200.000	1.338.000	1.448.385	1.574.550
Yogyakarta	1.173.300	1.305.500	1.452.400	1.572.200	1.709.150
D.I. Yogyakarta	988.500	1.108.249	1.237.700	1.337.650	1.454.154

Sumber: www.nakertrans.jogjaprov.go.id, 2014 - 2018

UMP dan UMK D.I. Yogyakarta mulai tahun 2013 masing-masing kabupaten/kota mempunyai UMK sendiri. Tabel 8.1 diatas juga menggambarkan urutan UMK dari terkecil sampai terbesar selama 5 (lima) tahun tidak mengalami perubahan yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan terakhir Gunung Kidul. Untuk UMP D.I. Yogyakarta mulai tahun 2017 sudah mencapai diatas 1,5 juta rupiah.

Grafik I. Pasar Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2017



IX. PASAR TENAGA KERJA

Penyebaran tenaga kerja yang tidak merata menyebabkan kurang optimalnya penggunaan sumber daya alam dan manusia. Untuk mengatasi ketidakmerataan tersebut dilakukan usaha-usaha antara lain melalui penyaluran dan pemanfaatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL) serta penyaluran dan pemanfaatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Data pendaftaran pencari kerja, lowongan kerja (permintaan), dan penempatan kerja (pemenuhan) diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja. Metode pengumpulan data pasar tenaga kerja ini adalah berdasarkan pelaporan sehingga mungkin belum dapat menggambarkan sepenuhnya keadaan pasar tenaga kerja dan hanya digunakan sebagai gambaran kasar saja.

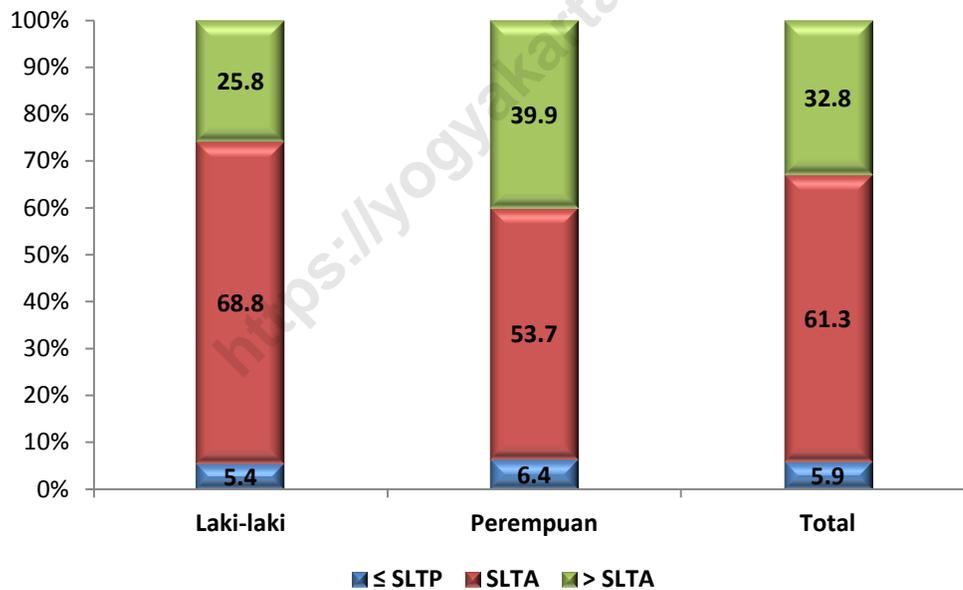
Tabel 9.1. Pasar Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2016-2017

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pencari kerja			
2016	26.115	28.896	55.051
2017	27.535	29.011	56.546
Lowongan kerja			
2016	4.908	7.890	12.798
2017	5.773	12.420	18.193
Penempatan/penghapusan			
2016	6.574	7.737	14.311
2017	6.280	8.899	15.179

Sumber : Disnakertrans D.I. Yogyakarta, 2017 - 2018

Tabel 9.1 memperlihatkan perbandingan antara pencari kerja terhadap lowongan kerja dan penempatan kerja yang terdaftar di Disnakertrans D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 56.546 orang pencari kerja dengan penempatan sebanyak 15.179 orang (sekitar 27 persen), sedangkan jumlah lowongan kerja yang tersedia untuk sebanyak 18.193 orang (32 persen). Artinya setiap 100 orang pencari kerja pada tahun 2017 yang berhasil ditempatkan sebanyak 27 orang baik di wilayah D.I Yogyakarta maupun luar D.I Yogyakarta dengan lowongan kerja yang tersedia untuk sebanyak 32 orang.

Gambar 9.1. Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar di Disnakertrans D.I. Yogyakarta menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2017



Sumber : Disnakertrans D.I. Yogyakarta, diolah kembali 2018

Kondisi pasar tenaga kerja pada tahun 2017 jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat bahwa untuk laki-laki, jumlah pencari kerja di D.I Yogyakarta terdapat sebanyak 27.535 orang dengan penempatan sebanyak 6.280 orang (sekitar 23 persen), sedangkan jumlah lowongannya sebanyak 5.773 orang (sekitar 19 persen). Untuk perempuan ternyata semua karakteristik pasar tenaga kerja lebih

banyak dibandingkan laki-laki. Pencari kerja perempuan sebanyak 29.011 orang dengan penempatan sebanyak 8.899 orang (sekitar 31 persen) dengan jumlah lowongan kerja sebanyak 12.420 (sekitar 43 persen).

Perbandingan persentase pencari pekerjaan antara laki-laki dan perempuan dengan tingkat pendidikan kurang dari SLTP adalah 5,4 persen berbanding 6,4 persen, sedangkan perbandingan pencari pekerjaan laki-laki dan pencari pekerjaan perempuan dengan pendidikan SLTA adalah 68,8 persen berbanding 53,7 persen. Ada berbagai kemungkinan pencari pekerjaan laki-laki pada tingkat pendidikan SLTA lebih banyak dari pada pencari pekerjaan perempuan antara lain tanggung jawab anak laki-laki dalam rumah tangga, ingin lebih cepat mandiri dan mencari penghidupan yang lebih baik dan pendidikan SLTA cukup sebagai bekal mencari kerja.

Tabel 9.2. Tenaga Kerja Indonesia menurut Kabupaten/kota dan Negara Tujuan Terbanyak yang diproses di BP3TKI Yogyakarta 2017

Kab/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total	Negara Tujuan Terbanyak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	190	480	670	Malaysia
Bantul	114	320	434	Malaysia
Gunungkidul	42	37	79	Malaysia
Sleman	52	155	207	Malaysia
Yogyakarta	37	49	86	Malaysia
D.I. Yogyakarta	435	1.041	1.476	Malaysia

Sumber : BP3TKI Yogyakarta, 2018

Untuk pencari pekerjaan perempuan lebih tinggi persentasenya dibanding pencari pekerjaan laki-laki pada tingkat pendidikan di atas SLTA ke atas yaitu 39,9 persen berbanding 25,8 persen. Kondisi ini kemungkinan berkaitan dengan jenjang pendidikan sebelumnya, perempuan ternyata lebih banyak yang melanjutkan pendidikan setelah SLTA. Dengan pendidikan lebih tinggi diharapkan mendapat pekerjaan yang lebih baik, sesuai dengan keinginan dan upah/gaji yang lebih tinggi.

Dalam rangka mendapatkan kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan hidup dan menggapai cita-cita calon tenaga kerja terpaksa menerima kesempatan kerja di luar daerah atau bahkan di luar negeri. Pada tahun 2017 berdasarkan data Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), jumlah tenaga kerja D.I. Yogyakarta yang diproses bekerja ke luar negeri mencapai 1.476 orang terdiri dari 435 orang laki-laki dan 1.041 orang perempuan. Jumlah tenaga kerja perempuan lebih banyak dibandingkan tenaga kerja laki-laki (Tabel 9.2). Hal ini menunjukkan kesempatan kerja perempuan di luar negeri lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

Jika dilihat menurut kabupaten/kotanya, penyumbang TKI dari D.I Yogyakarta paling banyak berasal dari Kabupaten Kulonprogo sebanyak 670 orang yang terdiri dari 190 orang laki-laki dan 480 orang perempuan, diikuti Kabupaten Bantul sebanyak 434 orang terdiri dari 114 orang laki-laki dan 320 orang perempuan dan Kabupaten Sleman sebanyak 207 orang terdiri dari 52 orang laki-laki dan 155 orang perempuan. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul paling sedikit penyumbang TKI dari D.I Yogyakarta hanya sebanyak 79 orang terdiri dari 42 orang laki-laki dan 37 orang perempuan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183 Telp.(0274) 4342234 (Hunting) Fax. 4342230
Email : bps3400@mailhost.bps.go.id Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id>



9 772460 317004